

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal mencakup berbagai metode dan peralatan yang digunakan dalam sebuah perusahaan dengan tujuan untuk melindungi aset perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, pengendalian internal dirancang untuk meminimalkan kesalahan dan penyimpangan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, baik yang disengaja maupun tidak. Pengendalian internal tidak hanya melibatkan pemeriksaan catatan, tetapi juga melibatkan evaluasi berbagai fungsi operasional dalam perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian internal diperlukan untuk membantu manajemen dalam mengendalikan perusahaan (Hafsah, 2019). Pengendalian internal memberikan kepastian yang wajar bahwa aset dilindungi dan digunakan untuk mencapai tujuan bisnis, informasi bisnis yang akurat, dan karyawan yang mematuhi peraturan dan ketentuan.

Menurut penelitian oleh Permatasari (2022), pengendalian intern merupakan bentuk pengawasan internal yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau data yang diperoleh sudah dilaksanakan dengan benar. Kebijakan dan prosedur ini biasa disebut sebagai pengendalian internal dan secara keseluruhan dikenal sebagai pengendalian intern perusahaan.

Menurut Prilian dani (2018), Mulyadi menyatakan bahwa sistem pengendalian intern mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi aset perusahaan, memastikan akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Definisi dari sistem pengendalian intern ini menekankan pada tujuan yang ingin dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Menurut definisi di atas, terdapat beberapa konsep dasar tentang sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dijalankan oleh orang dari setiap tingkat organisasi perusahaan, dan diharapkan dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan. Memeriksa dengan teliti dan memastikan keakuratan informasi akuntansi, menggalakkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

2.1.1.1 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut James A.Hall yang diterjemahkan oleh Dewi Fitrasari dan Deny Arnos (2019:181) diterapkannya pengendalian intern untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu :

- a) Untuk menjaga aktiva perusahaan
- b) Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi
- c) Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen

Tujuan sistem pengendalian intern menurut Nyak Umar, N. (2019) alasan perusahaan untuk menerapkan pengendalian intern adalah untuk membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan efisien. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian empat golongan tujuan

- a. Menjaga kekayaan organisasi
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c. Mendorong efisiensi
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Berdasarkan tujuan system pengendalian intern diatas maka diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan dan mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.1.1.2 Komponen-Komponen Pengendalian Intren

Menurut Pitaloka (2020) Commitee of sponsoring organization (COSO) menyatakan adanya lima komponen dalam pengendalian intern yang meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian perusahaan mencangkup sikap para manajemen da

karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut.

Lingkungan pengendalian intern terdiri dari faktor faktor yaitu :

- a) Filosofi manajemen dan gaya operasi
- b) Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika
- c) Komitmen terhadap kompetensi
- d) Komite audit dari dewan direksi
- e) Struktur organisasi
- f) Metode penetapan otoritas dan tanggungjawab
- g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan dilaksanakan kebijakan manajemen dan bahwa resiko telah diantisipasi. Aktivitas pengendalian juga membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk penanganan resiko telah dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Aktivitas pengendalian terdiri dari :

- a) Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak
- b) Pemisahan tugas dan fungsi
- c) Otoritas yang memadai atas transaksi bisnis yang terjadi
- d) Mengamankan harta dan catatan perusahaan
- e) Pemeriksaan independen atas kinerja

3. Penilaian Resiko (Risk Assessment)

Penilaian resiko merupakan proses identifikasi dan analisis resiko yang dapat menghambat atau berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, serta menentukan cara bagaimana resiko tersebut ditangani. Semua organisasi memiliki resiko, dalam kondisi apapun yang namanya resiko pasti ada dalam suatu aktivitas.

4. Informasi dan Komunikasi

Komponen ini menjelaskan bahwa informasi harus diproses, dan di informasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. Sistem informasi akuntansi harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang handal.

5. Pemantauan (Monitoring)

Supervise yang efektif meliputi pelatihan terhadap karyawan, memonitor kinerja karyawan, mengoreksi kesalahan yang mereka lakukan, serta mengamankan kerja harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap harta perusahaan.

2.1.1.3 Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Lein, M. O., Iskandar (2020) Mengidentifikasi keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern yaitu :

1. Kesalahan dalam perhitungan (poor judgement)

Seringkali manajemen dan personil lainnya dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadai informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

2. Gangguan (breakdown)

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

2.1.2 Kredit Bermasalah

Menurut Wijoyo, H. (2020) menyatakan faktor penyebab kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor intern lembaga keuangan

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit, misalnya kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga masalah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat lembaga keuangan yang menangani kredit dan nasabah, sehingga lembaga keuangan memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.

- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat lembaga keuangan terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur lembaga keuangan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan pemantauan kredit debitur

2. Faktor ekstern lembaga keuangan

- a. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Lembaga keuangan, karena nasabah tidak memiliki kemauan untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi modal kerja.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah yang menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
- d. Debitur mau melaksanakan sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- e. Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi
- f. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur
- g. Bencana alam yang dapat merugikan debitur

2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengendalian Intren

Sistem pengendalian intern adalah perubahan dari masing-masing sistem yang dipakai sebagai prosedur dan pedoman operasional Perusahaan. Penggunaan sistem pengendalian intern untuk mengarahkan operasional Perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Pada tahun 1992, Coso (the committee of sponsoring organizations of treadway commission) yang didirikan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut telah menerbitkan internal control framework yang didalamnya disusun defenisi

umum untuk pengendalian intern, standar, dan kriterial pengendalianintern yang digunakan Perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka.

Hal ini menegaskan bahwa sebaik apa pun sistem pengendalian intern itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai dan tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan sistem pengendalian intern meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan baik. Bahkan bagaimana pun baiknya sistem pengendalian intern yang ideal dirancang, namun keberhasilannya bergantung pada kompetensi dan keandalan dari pelaksanaan yang tidak lepas dari keterbatasan.

Menurut Wifriya, M., & Sanjaya, S. (2020) menyatakan bahwa Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi sistem pengendalian intren yang menyebabkan terjadinya kredit macet, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana :

1. Faktor internal

- a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b) Adanya kolusi antara pejabat yang menangani kredit dan nasabah, sehingga pihak koperasi memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, pihak koperasi melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris dan direktur sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur; dan sebagainya.

2. Faktor eksternal

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak koperasi, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam

memenuhikewajibannya.

2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja dan sebagainya.

b) Unsur ketidaksengajaan

1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit

Sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit terdapat faktor-faktor penting dalam kebijakan kredit yang diberikan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat Menurut Suryani, (2019 : 97) yaitu :

a. Salah satu upaya lebih mengarahkan agar pengkreditan didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan pengkreditan yang jelas.

b. Kebijakan pengkreditan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan pengkreditan

c. Untuk memastikan bahwa semua telah memiliki kebijakan pengkreditan yang ditetapkan.

d. Kebijakan pengkreditan dikatakan baik apabila minimal kebijakan kredit itu mencakup :

- 1) Prinsip kehati-hatian pengkreditan
- 2) Organisasi dan manajemen pengkreditan
- 3) Kebijakan persetujuan pengkreditan
- 4) Dokumentasi dan administrasi
- 5) Pengawasan kredit
- 6) Penyelesaian kredit bermasalah.

Menurut Kasmir yang sejalan dengan penelitian Piliandani (2019) secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak dari koperasibelum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapinya kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan dibatalkan saja.

c. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon pemimpin dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas- berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang inginkan.

d. On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberi tahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada saat permohonan dan pada saat wawancara I di cocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran

f. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit yang akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

Biasanya kebutuhan kredit yang akan mencakup :

- 1) Jumlah uang yang diterima
- 2) Jangka waktu kredit
- 3) Dan biaya yang harus dibayar

g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari putusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pertanyaan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

- 1) Antara bank dengan debitur secara langsung
- 2) Melalui notaries

h. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan yang bersangkutan.

i. Penyaluran/ penarikan dana

Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.1.5 Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 27, Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang didalamnya terdapat kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan meminjam uang untuk anggotanya jaminan yang sudah ditetapkan melebihi modal yang dipinjam. Sehingga pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha pembentukan modal simpanan bagi anggota secara teratur dan

berkesinambungan untuk memberikan pinjaman pada anggota dengan cara yang mudah dipahami, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Koperasi Simpan Pinjam mendapat modal dari berbagai simpanan, pinjaman, penyisaan dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya. Simpanan-simpanan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok yaitu simpanan yang diberikan anggota pada awal setoran dan menjadi simpanan yang berbentuk permanen.
2. Simpanan Wajib yaitu simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dalam jangka waktu tertentu.
3. Simpanan Sukarela adalah simpanan yang diterima bukan dari anggota koperasi itu sendiri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Adi Supriadi (2022)	Pengendalian Internal Pemberian Kredit Mikro UMKM Untuk Menjaga Likuiditas Di Masa Pandemic Covid-19 Pada Bank BPR Serang Cabang Cinangka	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif	Hasil penelitian dari pemhitungan rasio likuiditas terhadap laporan keuangan Bank BPR Serang Cabang Cinangka periode tahun 2019-2020 dengan perhitungan Rasio Likuiditas.
2	Adisty Fideria (2022)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian	Kualitatif	Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada PT BPR Raga Dana Sejahtera masih kurang sesuai dengan teori menurut COSO

		Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT BPR Raga Dana Sejahtera		diantaranya masih ada perangkapan fungsi jabatan, seperti pelaksanaan kredit dengan pembahasan kredit yang masih dikerjakan oleh 1 orang
3	Astrid Prasetyati Cahyani (2021)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian intern perlu didukung dengan menyediakan prosedur yang perlu diperbaiki atau perlu di tingkatkan agar pengendalian intern dapat dilaksanakan dengan baik.
4	Cahyuni Remak (2021)	Analisis Sistem Pegendalian Intern Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam	Kualitatif	Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam balo toraja belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan teori pengendalian intern menurut COSO
5	Chesi Indah Pratiwi Damanik (2019)	Analisis Efektifitas Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Union Harapan Jaya Kisaran Kabupaten Asahan	Medote Deskriptif Pendekatan Kuantitati	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa data dan informasi yang diperoleh serta hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.
6	Erga Amalluddin Nasution, Rosmiati Tarmizi (2023)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitati	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis dan pembahasan sistem penyaluran kredit dari pengendalian intern yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit

		(Study Kasus Bank Rakyat Indonesia Unit Pardasuka Cabang Pringsewu)		Pardasuka.
7	Fitria Ariska Putri (2022)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Angsuran Fidusia Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Perawang	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT pegadian (Persero) UPC Perawang Struktur Organisasi yang memisahkan tugas dan tanggung jawab fungsional secara tegas sudah berjalan dengan cukup baik. Yang mana masing-masing divisi sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya.
8	Hadion Wijoyo (2020)	Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri	Metode Kualitatif	Hasil ini menunjukkan bahwa pihak Bank tidak terlalu konsisten dalam penerapan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) karena pihak Bank beranggapan bahwa hal ini berhubungan dengan keadaan ekonomi nasional maupun global
9	Komang Ayu Megaputri, I Gd Putu Banu Astawa (2023)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Di Koperasi Pegawai Negeri Prajamukti	Metode Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif	Hasil dari kesimpulan penelitian ini menunjukkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengendalian internal atau pemberian kredit di koperasi pegawai negeri praja mukti.
10	Melisa Megda	Analisis	Metode	Berdasarkan Penelitian yang

	Rangian (2021)	Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Pengendalian Kredit di PT Bukopin Finance Graha Manado	Kualitati	dilakukan mengenai analisis pengendalian intern dalam pengendalian kredit pada PT Bukopin Finance Manado belum sepenuhnya sesuai dengan kerangka kerja pengendalian internal COSO
--	----------------	---	-----------	---

2.3 Kerangka Berpikir

Sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi dan segala cara serta tindakan yang saling terkoordinasikan dengan tujuan menjaga harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi. Kredit adalah memberikan kepercayaan kepada si penerima kredit, bahwasanya kredit yang diberikan akan dikembalikan tepat waktu. Tujuan kredit itu sendiri mencari keuntungan atas bunga yang diperoleh dan membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Sistem pengendalian intern yang baik dapat dijalankan dengan melaksanakan unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO yaitu unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengendalian aktivitas, informasi dan pemantauan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit harus memenuhi unsur-unsur pengendalian intern. Unsur-unsur ini sudah sudah baku ditetapkan pada Committee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commision (COSO).

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijaksanaan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen perusahaan, direktur dan konsumen serta pemilik suatu satuan usaha terhadap pengendalian atas satuan usaha. Unsur utama setiap organisasi adalah manusianya, atribut individual mereka termasuk integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi dan lingkungan dimana mereka beroperasi. Unsur manusia adalah mesin yang menggerakkan organisasi dan menjadi dasar atau landasan segala hal dalam organisasi (Fadly Situmorang, 2021).

Menurut Pangkey dkk., (2021), Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan

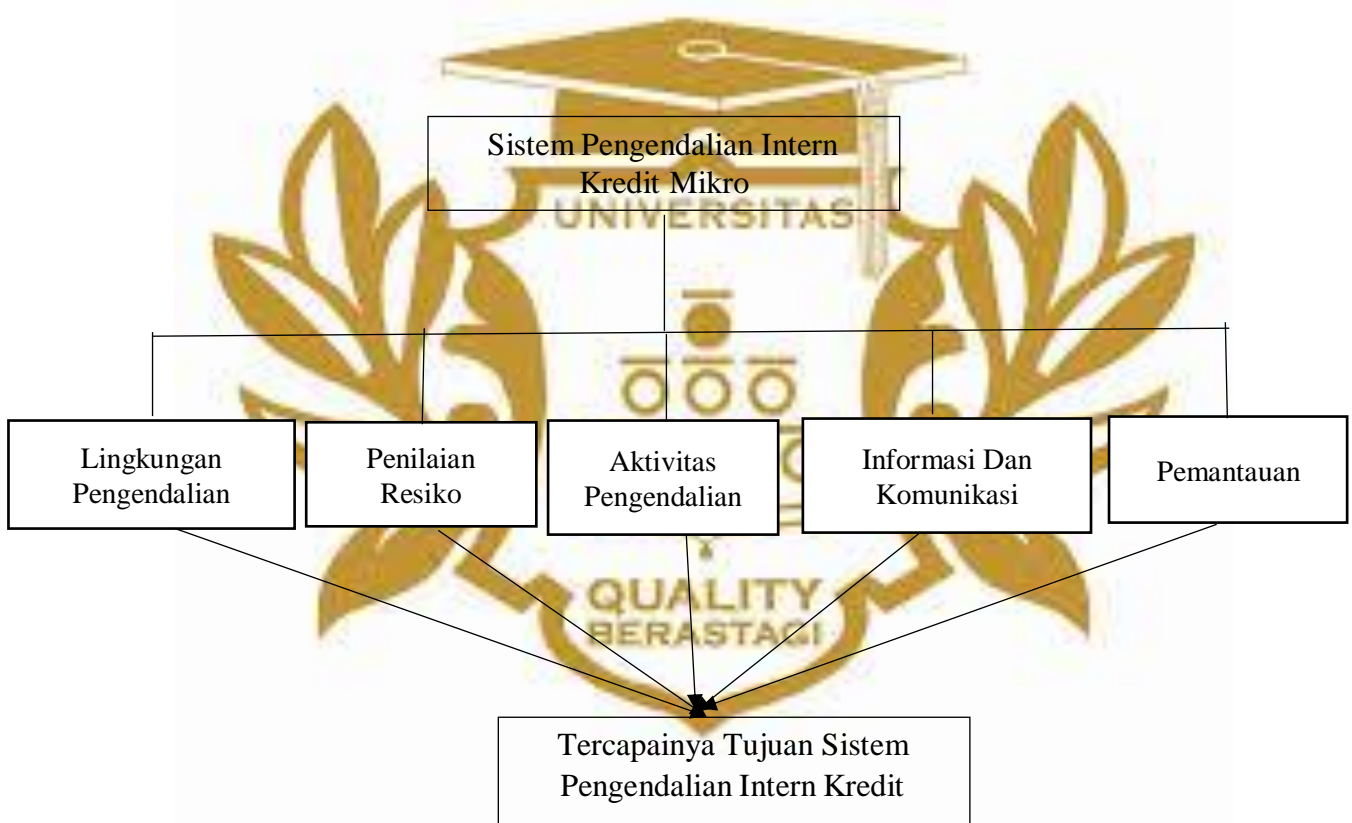
prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani resiko guna mencapai tujuan entitas. Aktifitas pengendalian terkait dengan kemampuan memilih jenis pengendalian yang tepat dari berbagai jenis pengendalian. Kemampuan ini secara langsung dipengaruhi oleh ketetapan dalam mengidentifikasi dan menilai besaran resiko.

Penafsiran resiko adalah setiap organisasi harus waspada berhubun dengan risiko yang akan dihadapi. Dan harus terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan serta kegiatan lainnya sehingga organisasi bisa beroperasi secara harmonis. Organisasi juga harus menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko tersebut. Dalam organisasi, penilaian risiko terkait dengan kemampuan mengidentifikasi serta mengukur besarnya risiko dalam mencapai tujuan organisasi.

Kemampuan setiap anggota organisasi untuk menilai risiko, akan tinggi dalam lingkungan pengendalian internal yang baik begitupun sebaliknya. Dalam lingkungan pengendalian internal yang buruk, kemampuan anggota organisasi untuk penafsiran risiko akan sangat rendah (Sondakh, Ilat, & Budiarmo, 2018) Informasi dan Komunikasi mencakup seluruh kegiatan dengan orang-orang di dalam organisasi untuk memperoleh dan bertukar informasi yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan, mengelola dan mengendalikan operasinya (Dewi, 2012). Keempat komponen pengendalian lainnya, akan mudah di realisasikan jika terdapat sistem informasi dan komunikasi yang baik dan andal jika setiap anggota organisasi mendapat pesan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, agar keseluruhan tujuan perorangan, seksi bagian dan keseluruhan organisasi dapat dicapai.

Aktivitas pemantauan yang keseluruhan proses harus dipantau dan dibuat modifikasi yang diperlukan. Dengan demikian, system pengendalian internal adalah dinamis, berubah sesuai tuntutan kondisi. Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk meyakinkan bahwa setiap Gerakan organisasi secara sinergis sedang mengarah kepada usaha pencapaian tujuan (Pitaloka et al., 2020). Hal ini dilakukan dengan menilai kembali kekuatan lingkungan pengendalian, usaha-usaha penilaian risiko dan pemilihan aktifitas pengendalian. Pemantauan bisa

dilakukan oleh manajemen operasi sendiri (on- going monitoring) atau dengan bantuan satuan pengawas internalnya (separate evaluation). Menjadi unsur penting dalam pemantauan adalah pelaporan terhadap penyimpangan dan kekurangan (deficiencies). Kerangka kerja pengendalian COSO menekankan pada suatu proses penyadaran akan pengendalian, penilaian dan pengelolaan risiko dengan aktifitas pengendalian yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi. Untuk itu maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 : Kerangka Berpiki